



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : APIP
- 2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
- 3. NHK : 804656

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 819.500.000

- 1. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m²/70 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
- 2. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m²/25 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m²/12 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
- 4. Tanah Seluas 640 m² di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 57.500.000
- 5. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m²/30 m² di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 227.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.900.000

- 1. MOTOR, SUZUKI GS 250 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
- 2. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 5.700.000
- 3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA/2 BU AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.300.000
- 4. MOBIL, NISSAN LIVINA XGEAR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
- 5. MOTOR, HONDA WIN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 9.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 67.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 700.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	988.300.000
III. HUTANG	Rp.	324.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	664.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.